

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN, EFEKTIVITAS  
PENGENDALIAN INTERNAL, PERAN AUDITOR INTERNAL,  
DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP  
PENCEGAHAN KECURANGAN  
(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)**

**Oleh :**

**Tiara Oktavia**

**Pembimbing : Taufeni Taufik Dan Al Azhar A**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*E-mail : [oktavia427@gmail.com](mailto:oktavia427@gmail.com)*

*The Effect Of Good Governance, The Effectiveness Of Internal Control, Role Of  
Internal Auditors, And The Obedience Of Accounting Rules To The Fraud  
Prevention (Empirical Study in SKPD of Riau Provinces)*

**ABSTRACT**

*The study aimed to analyze the effect of good governance, the effectiveness of internal control, role of internal auditors, and the obedience of accounting rules to the fraud prevention. Sampling technique used is purposive sampling. Object of this research is SKPD of Riau Provinces with the sample 93 respondents. Statistical method used to test the hypothesis of the research is multiple linear regression analysis and using Statistical Product and Service Solution (SPSS) software version 21.0. The results of this research showed good governance has an effect to the fraud prevention with direct effect 0,002 significance, the effectiveness of internal control has an effect to the fraud prevention with direct effect 0,016 significance, role of internal auditors has an effect to the fraud prevention with direct effect 0,004 significance and the obedience of accounting rules has an effect to the fraud prevention with direct effect 0,000 significance. Based on the research it was concluded that the determination coefficient ( $R^2$ ) is 0,620. It means that 62% of the fraud prevention can be explained by the variable good governance, the effectiveness of internal control, role of internal auditors and the obedience of accounting rules. While 38% is explained by other variables.*

*Keywords: good governance, the effectiveness of internal control, role of internal auditors, the obedience of accounting rules, fraud prevention.*

**PENDAHULUAN**

Pada saat sekarang ini, kecurangan telah merajalela merusak struktur pemerintahan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekalipun.

Kecurangan ini merupakan faktor penghambat utama dalam jalannya pemerintah dan pembangunan. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.

Fraud merupakan tindakan kriminal yang sering kali terjadi, terutama di abad ini dengan frekuensi terjadinya dan jumlah kerugian yang semakin besar dari tahun ke tahun. Fraud adalah sesuatu yang mau tidak mau akan dihadapi oleh semua organisasi swasta (Kurniawan, 2014 : 1)

Pada umumnya, kecurangan akuntansi berkaitan erat dengan korupsi. Dalam korupsi tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, ada 168 negara yang diamati lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih Negara tersebut dari korupsi. Skor maksimal adalah 100. Negara di peringkat teratas adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan Negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia. Adapun Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Peningkatan CPI Indonesia dipengaruhi oleh akuntabilitas public yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif.

*Fraud* atau kecurangan, dengan segala bentuk dan modusnya telah membawa dampak buruk dan kerugian kepada organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik. Setiap organisasi apapun jenis,

bentuk, skala operasi dan kegiatannya semua memiliki risiko terjadinya *fraud*. Praktik penggelapan, penyalahgunaan aset, penipuan pengadaan barang dan jasa, penipuan laporan keuangan termasuk korupsi, dari yang sederhana sampai yang sangat canggih dan kompleks, akhirakhir ini banyak terjadi (Anugerah, 2014).

Berdasarkan berita dari media elektronik, dari lima provinsi yang dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi karena tingginya angka korupsi, Riau berada di peringkat pertama. Menyusul daerah lainnya Aceh, Sumatera Utara, Papua, dan Papua Barat. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com))

Menurut informasi pada website KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus pada Provinsi Riau. Hal ini lantaran pejabat di provinsi tersebut banyak yang telah terjerat kasus korupsi. Berdasarkan statistik sejak 2007, khusus Provinsi Riau, KPK sudah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan total 25 orang.

(<http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3380-banyak-koruptor-riau-jadi-prioritas-kpk>)

Pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain : Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, Peran Auditor Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi.

Mardiasmo (2009:25) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu.

Hasil dari pelaksanaan *good governance* dalam lembaga dan instansi pemerintah adalah terciptanya sistem birokrasi yang bebas dari praktek korupsi, adanya proses pelayanan public yang prima kepada masyarakat sebagai stakeholders utama pemerintah dan berkurangnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparat pemerintah (Kurniawan, 2014 : 133)

Harapannya melalui *good governance*, pemerintah bukan lagi pihak yang harus dilayani oleh masyarakat, tapi pemerintah yang melayani masyarakat. Pemerintah harus memfokuskan semua aktivitasnya untuk melayani masyarakat melalui pelayanan yang prima dan bebas dari tindak korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2015) mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, dan peran auditor internal terhadap tingkat kecurangan. Menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan dan efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap tingkat kecurangan. Sedangkan peran auditor internal memiliki pengaruh terhadap tingkat kecurangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wiliyanti (2014) mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, dan peran auditor internal terhadap tingkat kecurangan. Hasilnya menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat kecurangan. Sementara itu, efektivitas pengendalian internal dan peran auditor internal berpengaruh terhadap tingkat kecurangan.

Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang diterapkan oleh pimpinan disuatu instansi/organisasi untuk bisa mengontrol instansi/organisasi tersebut dalam proses untuk mencapai tujuan instansi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu penyebab terjadinya kecurangan adalah lemahnya sistem pengendalian internal itu sendiri pada pemerintah daerah. Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal pemerintah pada pemerintah daerah khususnya diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Chairun Nisak, dkk (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan Kecurangan pada SKPD Bangkalan. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pada suatu instansi, maka semakin dapat mencegah kecurangan terjadi.

Di Indonesia, peran pengawasan internal ini diemban oleh auditor internal yakni Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). APIP adalah pegawai negeri sipil yang mendapat tugas melakukan pengawasan secara terstruktur dan sistematis terhadap seluruh perangkat pelaksana pemerintahan dimana APIP itu berada. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008,

pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran APIP yang baik tentu akan menunjang berkurangnya tingkat kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizke Wiliyanti (2014) mengenai Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan menunjukkan bahwa adanya pengaruh peran auditor internal terhadap tingkat kecurangan.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. Suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Jika instansi tidak menaati aturan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, maka dimungkinkan akan terjadi kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat ketaatan pada aturan akuntansi, maka kecurangan akuntansi akan semakin rendah.

Hasil penelitian Prekanida Farizqa Shintadevi (2015) menunjukkan bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan Akuntansi. Artinya semakin tinggi ketaatan instansi pada aturan akuntansi, maka akan semakin rendah Kecurangan Akuntansi yang dilakukan pegawai pada instansi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul penelitian **“Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, Peran Auditor Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)”**

### **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, peran auditor internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan”.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, peran auditor internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pencegahan Kecurangan**

*Fraud* adalah bentuk nyata dari kelicikan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang agar dapat mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan data dan informasi yang telah dimanipulasi kepada korban *fraud*. *Fraud* juga mengandung pengertian sebagai tipu daya dan cara-cara lain yang tidak sah yang akan merugikan korban/pihak yang ditipu. *Fraud* merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya pencurian, penggelapan,

penyalahgunaan kepercayaan maupun kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat intelektualitas dan kecerdasan yang tinggi (*white collar crime*). *Fraud* biasanya terjadi karena penyalahgunaan kepercayaan yang berlebihan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku *fraud*. Dengan kata lain, pelaku kecurangan sering kali adalah orang-orang yang dipercaya oleh korban *fraud* (Kurniawan, 2014 : 7)

Pencegahan kecurangan adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, dan mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum. (Suradi, 2006).

Metode yang digunakan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan adalah (Suruji dkk, 2007: 42) :

- 1) Adanya analisis terhadap pola data di setiap transaksi.
- 2) Menganalisis hubungan pemasok dengan karyawan.
- 3) Adanya analisis forensic terhadap sistem komputer.
- 4) Membangun struktur dan tata kelola yang baik.
- 5) Mengefektifkan fungsi internal audit dan pengendalian internal.
- 6) Adanya perbaikan sistem pengawasan.

### **Tata Kelola Pemerintahan**

Menurut Mulyadi (2016:129) konsep *good governance* mengisyaratkan keterlibatan tiga pihak utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling

menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.

Terdapat tiga sektor utama dalam tata kelola pemerintahan yaitu negara, sektor bisnis, dan masyarakat. Ketiga sektor ini harus dapat berinteraksi dengan baik antara satu dengan yang lain di dalam bidang ekonomi dan sosial ekonomi serta saling bekerja sama agar dapat melaksanakan pembangunan di semua bidang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari :

- (1) Profesionalitas.
- (2) Akuntabilitas.
- (3) Transparansi.
- (4) Pelayanan prima.
- (5) Demokrasi dan partisipasi.
- (6) Efisiensi dan efektifitas.
- (7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Secara umum ada empat manfaat yang diperoleh dalam penerapan *good governance* (Pareke, 2009):

- 1) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- 2) Meningkatkan kepercayaan publik.
- 3) Menjaga kelangsungan pemerintahan daerah.
- 4) Dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah.

### **Efektivitas Pengendalian Internal**

Dalam PP No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, pengendalian internal didefinisikan sebagai:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Di dalam sektor pemerintah Indonesia telah diterapkan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yaitu sistem pengendalian secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan SPIP ini diharapkan mampu memperkecil tingkat kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah .

### **Peran Auditor Internal**

Auditor internal dalam suatu instansi pemerintah berfungsi untuk menilai apakah sistem pengawasan internal yang telah ditetapkan berjalan dengan akurat serta setiap bagian benar-benar melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Auditor internal merupakan orang yang melakukan pekerjaan audit internal.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terdiri atas :

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
- 2) Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
- 3) Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;

- 4) Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Dalam kegiatan audit pemerintahan, terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh auditor inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah yaitu Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terbagi dalam 4 standar audit, yaitu sebagai berikut :

1. Standar umum
2. Standar pelaksanaan
3. Standar pelaporan
4. Standar tindak lanjut

Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, ketidaksesuaian prosedur dan indikasi penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut. Sehingga pada saat Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap lembaga pemerintahan ini, indikasi penyimpangan tersebut telah diperbaiki.

### **Ketaatan Aturan Akuntansi**

Ketaatan aturan akuntansi adalah kepatuhan dalam menaati pedoman-pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jika laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, maka akan memberikan kesempatan terjadinya kecurangan akuntansi yang akan merugikan pihak pengguna laporan keuangan.

Ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya (BUPK UNY, dalam Prekanida Farizqa Shintadevi : 2015).

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah 35 SKPD Provinsi Riau.

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang ditetapkan adalah:

1. Inspektorat, Badan, Dinas, Biro dan RSUD yang bekerja di Pemerintah Provinsi Riau.
2. Responden untuk penelitian ini yaitu: Kasubbag Keuangan, Bendahara dan Staff Akuntansi

yang memiliki jabatan baik struktural maupun fungsional yang terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Pemerintah Provinsi Riau.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Sumber data dari penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Taufeni Taufik (2010) dan penelitian Prekanida Farizqa Shintadevi (2015). Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berupa jurnal, artikel, dan literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan instrument berupa item-item pertanyaan yang disampaikan dalam bentuk kuesioner. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut diadaptasi dari peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian dilakukan dengan mengantarkan langsung ke SKPD Provinsi Riau.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Dependen**

#### **Pencegahan Kecurangan**

Kecurangan adalah bentuk nyata dari kelicikan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang agar dapat mendapatkan keuntungan

dengan cara memberikan data dan informasi yang telah dimanipulasi kepada korban *fraud*. *Fraud* biasanya terjadi karena penyalahgunaan kepercayaan yang berlebihan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku *fraud* (Kurniawan, 2014).

Indikator yang mendasari peneliti mengenai variabel Pencegahan *Fraud* menurut Taufik (2010) adalah:

1. Menciptakan budaya kejujuran, terbuka dan asistensi.
2. Menghilangkan kesempatan untuk berbuat curang

### **Variabel Independen**

#### **Tata Kelola Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti *good governance* sebagai suatu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Variabel implementasi *good governance* diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Taufik (2010) yaitu berdasarkan jawaban responden yang dikumpulkan dalam bagian dua dari kuesioner. Variabel implementasi *good governance* diukur dengan tiga indikator variabel yaitu :

1. Transparansi
2. Partisipasi
3. Akuntabilitas

#### **Efektivitas Pengendalian Internal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Instrument yang digunakan untuk mengukur keefektifan pengendalian internal terdiri dari lima item pertanyaan yang dikembangkan oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Variabel ini diukur dengan indikator:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan dan monitoring

#### **Peran Auditor Internal**

Standar audit adalah criteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terbagi dalam 4 standar audit, yaitu sebagai berikut :

1. Standar Umum
2. Standar Pelaksanaan
3. Standar Pelaporan
4. Standar Tindak Lanjut

#### **Ketaatan Aturan Akuntansi**

Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Siti Thoyibatun dalam Prekanida Farizqa Shintadevi (2015: 77) yang mengacu pada PP RI No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik menjelaskan beberapa indikator Ketaatan Aturan Akuntansi, yaitu:

1. Persyaratan pengungkapan
2. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik
3. Objektif
4. Memenuhi syarat kehati-hatian
5. Memenuhi konsep konsistensi penyajian

### Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Objek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah 35 SKPD Provinsi Riau. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan memilih sampel sesuai kriteria. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 SKPD, dengan responden masing-masing 3 orang setiap SKPD. Sehingga kuesioner yang disebar sebanyak 105 butir, namun yang kembali dan dapat diolah sebanyak 93 butir.

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atas deskripsi mengenai variabel-variabel

penelitian yaitu tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, peran auditor internal, dan ketaatan aturan akuntansi.

**Tabel 1**  
**Analisis Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	93	30.00	53.00	408.172	527.699
X2	93	59.00	95.00	765.054	808.329
X3	93	55.00	95.00	763.978	868.299
X4	93	46.00	80.00	669.462	704.854
Y	93	24.00	40.00	324.946	366.423
Valid N (listwise)	93				

Sumber : Data Olahan, 2017

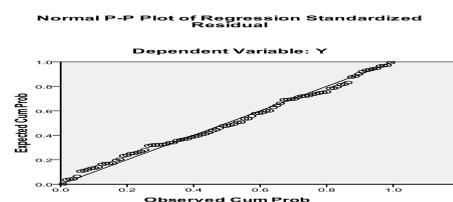
Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data dari penelitian ini cukup baik, karena nilai rata-rata (mean) lebih besar dari nilai standar deviasi yang mengidentifikasi bahwa standar error dari setiap variabel kecil.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual distribusi normal. Normalitas umumnya dideteksi dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**Menggunakan Garfik P-Plot**



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa grafik *normal probability plot of regression standardized* menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dibuktikan dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika hasil pengujian menyatakan bahwa nilai VIF kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai VIF besar dari 10 dan nilai *tolerance* kecil dari 0,10 maka pada model regresi linear terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016:103).

**Tabel 2**  
**Uji Multikolinieritas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
TKP	.828	1.208
1 EPI	.670	1.492
PAI	.530	1.888
KAK	.620	1.614

a. Dependent Variable:  
Pencegahan Kecurangan

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari tabel di atas, dapat diperoleh nilai VIF dari masing-masing variabel independen, untuk variabel TKP sebesar 1,208, variabel EPI sebesar 1,492, variabel PAI sebesar 1,888, dan variabel KAK

sebesar 1,614. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian karena setiap variabel independen memiliki nilai VIF < 10.

### Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi autokorelasi menggunakan pengujian statistik *Durbin Watson* (DW). Satu model regresi dinyatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW terletak antara -2 dan +2.

**Tabel 3**  
**Uji Autokorelasi**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.798 <sup>a</sup>	.636	.620	225.905	1.974

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3  
b. Dependent Variable: Y

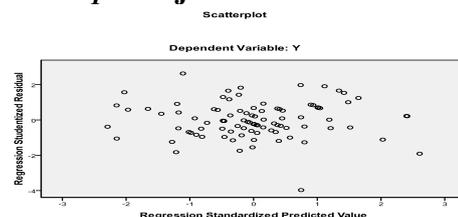
Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 3 diatas diketahui nilai *Durbin Watson* terletak antara -2 dan +2 = -2 < 1,974 < +2. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat penyebaran titik-titik pada *scatterplot*. Apabila titik-titik pada scatterplot menyebar ke atas, ke bawah, serta menyebar ke sekitar angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 2**  
**Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data Olahan, 2017

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda ini tidak hanya melihat berpengaruh signifikan atau tidak variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga dapat melihat arah dari pengaruh tersebut.

**Tabel 4**  
**Uji Analisis Regresi Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-1.583	2.822	
TKP	.159	.049	.229
1 EPI	.087	.036	.193
PAI	.111	.037	.263
KAA	.186	.042	.357

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

**Sumber : Data Olahan, 2017**

Dari Tabel 4 diatas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PK = -1,583 + 0,159 X_1 + 0,087 X_2 + 0,111 X_3 + 0,186 X_4 + e$$

### Uji Hipotesis

#### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi adalah untuk melihat persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 5**  
**Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.798 <sup>a</sup>	.636	.620	2.25905

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Aturan Akuntansi, Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, Peran Auditor Internal

b. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

**Sumber : Data Olahan, 2017**

Dari tabel 5 diatas diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,620. Artinya adalah bahwa persentase pengaruh tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, peran auditor internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan kecurangan pada SKPD Provinsi Riau sebesar 62 %. Sedangkan sisanya sebesar 38 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti asimetri informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan komitmen organisasi.

### Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel penjelas (independen) berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam pengujian ini digunakan  $\alpha = 5\%$  artinya kemungkinan kesalahan hanya boleh jika  $p < 5\%$ , jika  $p > 5\%$  model dianggap tidak signifikan sehingga  $H_0$  ditolak. Uji t dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, peran auditor internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan.

**Tabel 6**  
**Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.583	2.822		-.561	.576
TKP	.159	.049	.229	3.239	.002
EPI	.087	.036	.193	2.452	.016
PAI	.111	.037	.263	2.979	.004
KAA	.186	.042	.357	4.375	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

**Sumber : Data Olahan, 2017**

Dari tabel, maka diperoleh kesimpulan uji-t sebagai berikut:

- a. Dari tabel 6 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 3,239 dengan signifikansi 0,002. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) dengan dengan persamaan  $n - k - 1$  ;  $\alpha/2 = 93 - 4 - 1$  ;  $0,05/2 = 88$  ;  $0,025 = 1,987$ . Dengan demikian maka t hitung (3,239) > t tabel (1,987) dan signifikansi (0,002) < 0,05. Artinya tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap Pencegahan kecurangan pada SKPD Provinsi Riau” diterima.
- b. Dari tabel 6 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,452 dengan signifikansi 0,016. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) dengan dengan persamaan  $n - k - 1$  ;  $\alpha/2 = 93 - 4 - 1$  ;  $0,05/2 = 88$  ;  $0,025 = 1,987$ . Dengan demikian maka t

hitung (2,452) > t tabel (1,987) dan signifikansi (0,016) < 0,05. Artinya efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan” diterima.

- c. Dari tabel 6 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,979 dengan signifikansi 0,004. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) dengan dengan persamaan  $n - k - 1$  ;  $\alpha/2 = 93 - 4 - 1$  ;  $0,05/2 = 88$  ;  $0,025 = 1,987$ . Dengan demikian maka t hitung (2,979) > t tabel (1,987) dan signifikansi (0,004) < 0,05. Artinya peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada SKPD Provinsi Riau” diterima.
- d. Dari tabel 6 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 4,375 dengan signifikansi 0,000. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada tingkat signifikansi 5%) dengan dengan persamaan  $n - k - 1$  ;  $\alpha/2 = 93 - 4 - 1$  ;  $0,05/2 = 88$  ;  $0,025 = 1,987$ . Dengan demikian maka t hitung (4,375) > t tabel (1,987) dan signifikansi (0,000) < 0,05. Artinya ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada SKPD Provinsi Riau” diterima.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Secara parsial, variabel tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, peran auditor internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

### Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan pada SKPD Provinsi Riau.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara serta angket terbuka dalam penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pencegahan kecurangan berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal. 2004. *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*.
- Anugerah, Rita. 2014. *Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud*. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Statistic Deskriptif*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- , 2016. *Analisis Statistic Deskriptif*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2008). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Ardeno. 2014. *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*. Edisi 1. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY". *Accounting Analysis Journal*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Nisak, Chairun, dkk. 2013. *Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Kabupaten Bangkalan*. JAFFA Vol. 01 No. 1.
- Oktavia, Karlina Gita. 2015. *Pengaruh Tata Kelola*

- Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan.* Jurnal. Akuntansi Universitas Riau.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pradana, Diven Kreshnadi Satra. 2015. "Pengaruh Objektivitas, Pengalaman Keraj dan Integritas Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru.
- Prawira, I Made Darma, dkk. 2014. *Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. e-Journal. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Gahesha.
- Pristiyanti, Ika Ruly. 2012. "Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan". *Accounting Analysis Journal*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Rahmaidha, Rizky. 2016. "Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecurangan Akuntansi". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riduwan, 2008. *Dasar-Dasar Statistik*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Shintadevi, Prekanida Farizqa. 2015. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal. Alumni Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Suradi, 2006. *Korupsi Dalam Sektor Publik Dan Swasta*. Penerbit Gaya Media, Yogyakarta

- Taufik, Taufeni. 2010. "Pengaruh Internal Auditor, Eksternal Auditor dan DPRD Terhadap Pencegahan Kecurangan". *Pekbis Jurnal*, Vol.2, No.2, Juli 2010: 292-300.
- . 2011. "Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan". *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.2, Juli 2011: 512-520.
- Wiliyanti, Rizke. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan*. Jurnal. Akuntansi Universitas Riau.
- Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Jurnal. STIE Perbanas Surabaya.
- Wolk, H. I., and Michael G. Tearney, 1997. *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach* 4<sup>th</sup> ed. Ohio, South-Western College Publishing.
- <http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3380-banyak-koruptor-riau-jadi-prioritas-kpk>
- <http://regional.liputan6.com/read/2482543/riau-paling-disorot-kpk-juara-korupsi>